

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM
BERPOLIGAMI YANG BERTUJUAN MEMPEROLEH ANAK
LALU MENCERAIKANNYA DALAM HASIL KEPUTUSAN
LEMBAGA *BAḤSUL AL-MASĀ'IL* NAHDLATUL ULAMA
KOTA SURABAYA DI YAYASAN TORIQUL JANNAH PAKAL
BENOWO SURABAYA 31 JANUARI 2006 NO.13**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Inwan

NIM: C01215025



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Inwan
NIM : C01215025
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum
Berpolidami Yang Bertujuan Memperoleh Anak
Lalu Menceraikannya Dalam Hasil Keputusan
Bahsul Al-Masā'il Nahdlatul Ulama Kota
Surabaya Di Yayasan Toriqul Jannah Pakal
Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No.13.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 4 September 2019

Saya yang menyatakan



Muhammad Inwan
C01215025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Hukum Berpoligami yang bertujuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya dalam Hasil Keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā’il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No. 13.” yang ditulis oleh Muhammad Inwan. NIM. C01215025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 September 2019

Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Inwan NIM. C01215025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 4 September 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

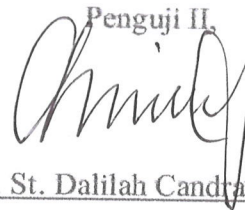
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



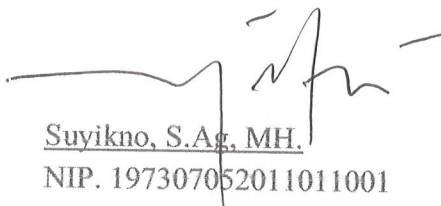
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,



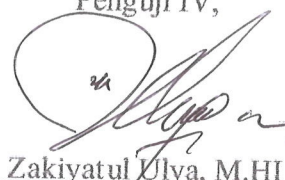
Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.ag.
NIP.196006201989032001

Penguji III,



Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP.199007122015032008

Surabaya, 14 Oktober 2019


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Inwan
NIM : C01215025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : muhinwan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM BERPOLIGAMI YANG
BERTUJUAN MEMPEROLEH ANAK LALU MENCERAIKANNYA DALAM HASIL
KEPUTUSAN LEMBAGA *BAHSUL AL-MASĀ'IL* NAHDLATUL ULAMA KOTA
SURABAYA DI YAYASAN TORIQU L JANNAH PAKAL BENOWO SURABAYA 31
JANUARI 2006 NO.13**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 November 2019

Penulis

(Muhammad Inwan)

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM.....	i	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii	
PENGESAHAN	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vi	
DAFTAR ISI.....	viii	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi	
BAB I PENDAHULUAN	1	
A. Latar Belakang Masalah.....	1	
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6	
C. Rumusan Masalah	7	
D. Kajian Pustaka.....	8	
E. Tujuan Penelitian	12	
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13	
G. Definisi Operasional.....	13	
H. Metode Penelitian.....	15	
I. Sistematika Pembahasan	19	
BAB II POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM	21	
A. Poligami dalam Islam.....	21	
1. Pengertian Poligami	21	
2. Sejarah Poligami.....	23	
3. Dasar Hukum Poligami	27	
4. Syarat-syarat Poligami	30	
5. Alasan Poligami	32	
6. Hikmah Poligami.....	35	
7. Tujuan Poligami	37	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnaḥullāh* yang menjadi dambaan pada semua makhluk Allah. Menyatukan antara laki-laki dan perempuan ialah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Agar nantinya akan memberikan sebuah keturunan yang akan terus berkembang.¹

Firman Allah Swt, dalam Surat Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.²

Pada umumnya tujuan pernikahan sendiri bergantung pada individu masing-masing yang akan melaksanakan, namun tujuan yang banyak diinginkan oleh setiap manusia dalam melaksanakan pernikahan yakni untuk memperoleh keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat.³ Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin karena telah terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga tercapailah kebahagiaan. Adapun tujuan dalam pernikahan dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

² Departemen Agama RI, *Alquran Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'* (Jakarta: PT. Suara Agung), 522.

³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1...*, 12.

Poligami adalah laki-laki yang menikahi dua, tiga atau empat wanita, dan suami menyatukan wanita-wanita tersebut dalam satu waktu.⁷ Dalam Islam poligami telah diatur secara lengkap dan sempurna, akan tetapi jarang sekali seseorang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu menolong wanita. Kebanyakan dari mereka yang melakukan poligami karena hawa nafsu saja. Hal demikian sering terjadi di Indonesia khususnya. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan batasan-batasan yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 215.

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13 yang dianalisis menggunakan Hukum Islam. Dengan demikian, dari uraian yang telah dipaparkan diatas berdasarkan latar belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- [illegible]

- c. Tinjauan hukum Islam terhadap poligami bersyarat.
- d. Hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.
- e. Analisis hukum Islam terhadap hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

- a. Hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13.
- b. Analisis hukum Islam terhadap hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulamā' Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah, yaitu;

Kajian pustaka ini akan membahas perbedaan dan persamaan bidang kajian antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikasi dari kajian peneliti sebelumnya.

Adapun pembahasan mengenai poligami sebagaimana yang sudah dibahas, antara lain:

- [illegible]

keadilan suaminya.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjelaskan tentang poligami.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berkeluarga menurut Al-Syatibi, sedangkan penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada konsep poligami untuk memperoleh keturunan menurut *bahsul al-masā' il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.

2. Hijrah dalam tesisnya yang berjudul “Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami”. Dalam penelitian tesis ini menjelaskan hukum poligami boleh akan tetapi dengan syarat, artinya hukum poligami akan menjadi haram jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa hukum poligami sunnah asalkan adil, artinya hanya adil syaratnya. Tetapi adil saja tidak cukup menurut Quraish Shihab karena masih ada syarat lain yang harus dipenuhi, dan itupun dalam keadaan benar-benar darurat.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjelaskan tentang poligami dengan pendekatan pendapat ulama.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu lebih menitik beratkan syarat-syarat poligami menurut Quraish Shihab, sedangkan penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada konsep poligami untuk memperoleh keturunan menurut *baḥsul al-masā'il*/Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.

¹² Ahmad Makki, “Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqosid As-Syariah Menurut Al-Syathibi” (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

¹³ Hijrah, "Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami" (Tesis--IAIN, Mataram, 2017).

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu lebih menitik beratkan hukum poligami menurut pandangan MUI Jakarta Utara, sedangkan penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada konsep poligami untuk memperoleh keturunan menurut *bahsul al-masā'ī*/Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.

4. Muhammad Salman Al-Farisi dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan ‘Aisyiyah Tentang Poligami” dalam penelitian skripsi ini ‘Aisyiyah sebagai salah satu ormas perempuan besar di Indonesia berpendapat bahwa dalam konteks *Asbabul Nuzul* QS. An-nisa [4]: 3, poligami dibolehkan karena zaman tersebut manfaatnya sangat cocok sebagai solusi darurat di waktu itu. Poligami diperbolehkan asalkan ada unsur darurat sosial dan kebermanfaatannya. Apabila alasan poligami tentang dakwah dan

[illegible]

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu menggunakan konsep poligami menurut ‘Aisyiyah, sedangkan penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada konsep poligami untuk memperoleh keturunan menurut *bahsul al-masā’il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.

5. Ade Irma Imamah dalam skripsinya yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami" dalam penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan poligami. Seperti faktor pemahaman keagamaan, faktor sosial ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor biologis.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjelaskan tentang poligami.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan poligami, sedangkan

¹⁶ Ade Irma Imamah, “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami” (Skripsi--Universitas Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

Melihat pada penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, maka dapat terbukti bahwa penulis tidak melakukan pengulangan ataupun plagiasi. Sehingga skripsi ini dapat membedakan dengan skripsi atau penelitian terdahulu dikarenakan topik, obyek serta rumusan masalah yang berbeda.

Berdasarkan dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, ialah:

1. Mengetahui hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap terha hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13.

G. Definisi Operasional

Pembuatan definisi operasional ini bertujuan agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami kata maupun istilah asing yang ada di dalam judul skripsi ini, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- ## 1. Hukum Islam

Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

[illegible]

Poligami dapat diartikan dengan perkawinan antara laki-laki dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang istri atau melakukan madu terhadap beberapa orang istri.¹⁸

3. *Bahsul Al-Masā' il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.

¹⁸ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami* (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media. 2007). 20.

[illegible]

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang ada.²¹ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini di antaranya sebagai berikut:

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari pengamatan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian.²² Dalam penelitian lapangan ini bersumber pada data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

²² P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 82.

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.
- 3) Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*.
- 4) Mohammad Kholison, *Fiqh Munakahat*.
- 5) Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁴ Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- ## 5. Teknik Pengolahan Data

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

- ²⁵ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
²⁶ Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 154.
²⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 11.

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, analisis data ini berguna untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data. Setelah seluruh data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisa sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Yang dipakai dalam analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸ Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam fiqh, KHI dan UU dijadikan sebagai fatwa atau pedoman untuk menganalisis pernikahan poligami.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, idenfikasi dan batasan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

²⁸ Ibid., 36.

Bab ketiga, yaitu hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan lembaga *bahsul al-masā'il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya*”, yang merupakan deskripsi dan penyajian data penelitian tentang gambaran umum Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surabaya, serta deskripsi mengenai hasil keputusan *bahsul al-masā'il* yang di dalamnya meliputi langkah-langkah dalam penentuan hukum dan data tentang keputusan.

Bab kelima, yaitu berupa penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَنَاتِ ۖ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا

2. Sejarah Poligami

Pendapat selama ini bahwa ajaran Islam yang membawa aturan poligami adalah kurang tepat, sebenarnya sistem poligami ini hingga dewasa saat ini masih terus tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti : orang-orang asli Afrika, Hindu, India, Cina dan Jepang.

⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Solidaritas Perempuan dan The Foundation, 1999), 3.

Di negara barat, banyak orang yang membenci dan menentang poligami. Kebanyakan bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami adalah tindakan yang tidak bermoral karena dianggap sebagai perbuatan yang cabul. Akan tetapi, pada kenyataannya justru menunjukkan lain. Di negara barat, praktik-praktik poligami terjadi kian merajalela diluar perkawinan. Hal yang seperti ini sudah lama terjadi sejak dahulu, dan sudah bukan jadi rahasia lagi. Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon 1, adalah contoh dari beberapa kalangan orang-orang besar di Eropa yang melakukan poligami secara illegal. Bahkan, pendeta-pendeta Nasrani yang telah mengucap sumpah tidak akan melakukan perkawinan selama masa hidupnya, mereka sudah tidak malu lagi dengan kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan izin yang sederhana dari uskup atau kepala-kepala gereja mereka.¹⁰

Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, terj. Muhammad Thalib (Bandung: FT. Al-Ma'arif, 1997), 190.
Moh. Thalib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq* (Bandung: Alma'arif, 1990), 170.
ni dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, 353.

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, 353.

Sedangkan Talmud membatasi jumlah wanita yang diperistri sesuai dengan kemampuan suami memelihara dengan baik. Meskipun para Rabbi memberi nasihat agar tidak memiliki istri lebih dari empat orang.¹¹

Pertama, dengan cara membatasi jumlah istri paling banyak empat orang saja. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut.

“Dari Ibnu ‘Umar radiyallahu ‘anhuma: “bahwasanya Ghailan ibnu Salamah Ats-Tsaqafiy masuk Islam sedangkan ia mempunyai sembilan istri yang juga bersamanya. Maka Nabi saw,

[illegible]

memerintkannya untuk memilih empat orang diantaranya (dan menceraikan sisanya)”.¹²

Kedua, menetapkan syarat yang adil bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Bersikap adil terhadap Istri adalah suatu keharusan bagi seorang suami, yaitu adil dan sesuai atau sama rata dalam hal-hal mengenai nafkah, tempat tinggal, pergaulan yang baik, bertanggung jawab dalam kewajiban-kewajiban istri dan memberikan hak-hak istri, adapun mengenai masalah kecintaan hati, tidak termasuk sesuatu yang dituntut harus adil, karena tidak ada satu manusiapun yang mampu mengatasi kecintaan dalam hatinya (adil dalam cinta).¹³ sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian” (QS. al-Nisa’ ayat 129)¹⁴

Dengan demikian, sangat terlihat bahwa praktek tentang poligami di masa Islam sangatlah berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu terlihat jelas pada dua hal. Pertama, pada pembatasan maksimal memiliki istri, dari yang semula tidak ada batasan jumlah menjadi dibatasinya maksimal hanya empat. Kedua, pada syarat poligami, yaitu harus mampu bersikap adil. Sebelumnya, poligami belum mengenal syarat apapun, termasuk dalam keadilan. Akibatnya poligami banyak menimbulkan penderitaan bagi kaum wanita, karena para suami yang

¹² Muhammad bin Isa Abu Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Beirūt: Dār Ihyaṭurazil Arabi), 435.

¹³ Mohammad Kholison, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), 48.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 87.

Islam datang untuk menetralkan mengenai tradisi poligami yang terdapat pada bangsa-bangsa dunia khususnya bangsa Arab Jahiliyah. Dengan adanya sistem poligami dalam ajaran Islam, merupakan suatu karunia terbesar bagi kehidupan manusia, karena dapat menghindari dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang buruk dalam masyarakat yang mengakui poligami.¹⁵ Islam memberikan batasan jumlah dalam poligami yang tidak melebihi dari empat orang istri dan sesuai kemampuan seorang suami dari jumlah nafkah yang di tanggunginya. Jadi anggapan yang mengatakan bahwa agama Islam yang membawa ajaran poligami adalah tidak benar. Justru agama Islamlah yang datang dengan membawa perubahan-perubahan yang radikal terhadap pelaksanaan poligami.

3. Dasar Hukum Poligami

Dalam Islam membolehkan laki-laki melakukan poligami sebagai jalan keluar atau sebagai alternatif untuk menyalurkan hasrat seks seorang laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu batinnya agar tidak terjerumus dalam perzinahan atau aturan yang sudah jelas dilarang oleh agama. Karena sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami jauh dari terjerumusnya dalam jurang maksiat yang dilarang oleh agama Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh menikah lagi

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 360.

”Mereka bertanya kepadamu mengenai masalah perempuan. Katakanlah Allah memberikan nasihat kepadamu tentang urusan mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an tentang anak-anak perempuan yatim yang tidak engkau berikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, padahal kamu ingin untuk mengawini mereka”. (An Nisa' ayat127)¹⁹

a. Apabila ada seorang laki-laki yang sangat membutuhkan istri lagi. Artinya, apabila dengan satu istri si suami belum bisa menjauhkan diri dari suatu hal yang tidak halal, atau si istri pertama mempunyai suatu penyakit yang berkepanjangan atau mandul, sehingga belum dapat memberikan keturunan, sedangkan suami sangat berharap dapat memiliki buah hati, dan suami berkeyakinan mampu bersikap adil apabila mempunyai istri lebih dari satu, maka dalam kondisi ini poligami disunnah kan, karena didalam perkara tersebut terdapat maslahat yang disyariatkan. Inilah yang dilakukan sebagian besar sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelahnya.

[illegible]

Dalam membahas tentang apa saja syarat-syarat poligami, maka perlu diketahui bahwa poligami itu disyaratkan di dalam al-Qur'an tentang keharusan suami harus berlaku adil kepada istri-istri mereka. Islam membolehkan melakukan poligami dengan batasan atau syarat-syarat sebagai berikut:

Dalam ajaran Islam hanya diperbolehkan seorang laki-laki boleh melakukan poligami maksimal dengan empat orang istri saja.

[illegible]

33

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari ketiga alasan di atas menimpa pasangan suami-istri, kehampaan di dalam rumah tangga akan menerpanya. Misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu laju bahtera rumah tangga. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Demikian juga jika istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Demikian halnya ketika istri tidak dapat memberikan keturunan, tidak semua pasangan suami istri yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih jalan alternatif untuk berpoligami. Mereka juga kadang menempuh cara dengan mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami adalah wajar, karena berkeluarga tanpa memiliki anak tidaklah lengkap.²³

Berikut alasan diperbolehkannya poligami dalam Islam, antara lain:

- a. Poligami merupakan sunnah Rasulullah saw dan mempunyai landasan teologis yang jelas yakni pada ayat 3 surah An-Nisa'. Karena itu,

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 171.

f. Poligami memberikan kesempatan kepada perawan tua, janda-janda yang dicerai.

6. Hikmah Poligami

Demi kebaikan manusia dan umat Islam mensyariatkan poligami, namun berpoligami bukanlah wajib, dengan larangan berpoligami akan timbul dampak negatif terhadap kaum wanita, kehidupan yang sulit diatasi, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkecil dampak negatif itu ialah dengan memberikan beberapa ketentuan dan etika Islam yang berkaitan dengan poligami. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.²⁵

Sebagai umat Islam yang patuh terhadap ajaran-ajarannya, harus yakin bahwa segala sesuatu pasti mengandung kemaslahatan, dan semua hukum-hukum Allah mengandung kebaikan. Demikian halnya dalam poligami bagi laki-laki pasti di dalamnya mengandung kemaslahatan dan kebaikan apabila dilakukan sesuai dengan konsep-konsep dan ajaran agama Islam dalam berpoligami.²⁶

Dengan menyimak hikmah-hikmah yang terkandung didalam poligami, hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk turut memperhatikannya. Diantara hikmah-hikmahnya ialah:

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 86.

²⁶ M. Ahnan dan Ummu Khoiroh, *Poligami Dimata Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2011), 167.

a. Agar mendapatkan keturunan bagi suami subur dan istri mandul.

[illegible]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan poligami adalah untuk kemaslahatan umat. Walaupun demikian, sebagian masyarakat masih menentang praktik poligami ini. Padahal tujuan dari dibolehkannya poligami secara umum ialah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.²⁹

Berbicara tentang poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah Saw. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap

²⁹ Muh. Saleh Ridwan, *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia* (Makasar: Alauddin University Press, 2011), 63.

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.³⁰

1. Pandangan Imam Syafi'i

³⁰ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 184.

Dalam pandangan Quraish Shihab, surat al-Nisa' ayat 3 memang menjadi dasar kebolehan berpoligami. Namun, keberadaan ayat tersebut sering disalah pahami oleh kebanyakan orang. Pada dasarnya, ayat tersebut diturunkan bukan untuk membuat satu peraturan tentang poligami, mengingat poligami sudah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat-istiadat sebelum ayat tersebut turun. Ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang diperbolehkannya poligami. Poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui jika sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.

Lebih lanjut, Qurais Shihab memaparkan bahwa pembahasan poligami tidak hanya dikaji dari sudut pandang ideal atau baik dan buruknya. Poligami juga harus ditinjau dari sudut pandang pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Sehingga, sebagai agama yang berlaku setiap waktu dan kondisi, agama islam wajar mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa diterapkan pada suatu kejadian tertentu, meskipun kejadian tersebut hanya sebuah kemungkinan.

Seorang istri mungkin saja dapat mengalami kemandulan atau mengalami penyakit parah sehingga tidak dapat melayani suami secara utuh. Dalam menghadapi kemungkinan semacam ini, tentu suami memerlukan penyaluran biologis yang paling ideal, yakni dengan

Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil, ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 1998), 199.

[illegible]

sikap yang bijak dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang merasa disakiti, dengan demikian poligami diperbolehkan.³⁶

Selain itu, poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur, ia memahami ayat tersebut bahwa Allah swt bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.³⁷

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak lain.³⁸

³⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1989), 1.

³⁷ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq, 2004), 428.

³⁸ Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 192.

Dalam perjalanan sejarah NU, keberadaan kantor NU ini sangatlah penting, sebab selain menjadi tempat untuk menyimpan berbagai arsip serta menjalankan rapat penting, kantor ini menjadi simbol eksistensi NU.

Dengan kata lain, bagaimanapun keadaannya kantor ini harus tetap ada. Ini dibuktikan, ketika beberapa kali Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpaksa memindahkan kantornya, karena terjadi peperangan di Surabaya atau saat terjadi gangguan keamanan akibat pemberontakan PKI atau FDR di Madiun tahun 1948. Sejak berpindah karena beberapa faktor, kemudian kantor HBNO yang berada di Surabaya, tepatnya di Jl. Bubutan gang VI No. 2 menjadi kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya.

Berikut struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Surabaya:

- [illegible]

- c. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kabupaten atau kota, dan PCI NU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) untuk luar negeri.
- d. MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kecamatan.
- e. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kelurahan atau desa.

Struktur Susunan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Surabaya Masa
Khidmat 2015-2020 : Lembaga Kepengurusan NU:

- a. Mustasyar (Penasehat) terdiri dari:
- 1) KH. DR. Asep Saifuddin Chalim, MA
 - 2) KH. Ahmad Dzul Hilmi
 - 3) KH. Ahmad Maghrobi Chojadi
 - 4) KH. Minanur Rahman Al-Ishaq
 - 5) KH. Azmi Nawawi
- b. Syuriah (Pimpinan Tertinggi) terdiri dari:
- 1) Rais Aam : KH. Mas Sulaiman Nur
 - 2) Wakil Rais Aam : KH. M. Ashar Shofwan, M.PdI
 - 3) Beberapa Rais : a) KH. Ahmad Sholeh Sahal
b) KH. Abdul Bari
c) KH. M. Qodli Syafi'i
d) KH. Hasyim Rowi
e) KH. Dr. Imam Ghozali Said

4. *Bahsul Al-Masā'il*

³ Data Terlampir

Dalam pengkajian fiqh, terutama dalam bahsul al-masā'il NU menganut aliran bermadzhab, yaitu mengikuti salah satu dari salah satu imam mujtahid, diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Menurut Hasyim Asy'ari dengan mengikuti pendapat empat imam madzhab akan mendapatkan kemaslahatan bagi umat Islam yang tidak terhitung bagi umat Islam, sebab hukum Islam tidak akan dapat dimengerti melalui pengambilan dan pemindahan hukum Al-Ahkam Istinbath. Al-Ahkam Istinbath untuk mencapai kebenaran harus mengenali pendapat-pendapat sebelumnya supaya tidak keluar dari *ijma'*. Dalam Undang-undang Dasar NU disebutkan bahwa barang siapa menyebutkan ilmu yang tidak menyebutkan sanadnya dia seperti pencuri.⁷

Hasil Keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama
Surabaya Di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 3
2006 No 13.

Poligami adalah salah satu hal dalam perkawinan yang kerap menimbulkan persoalan yang sudah lama terjadi, poligami pun biasanya dipandang sebagai suatu hal yang tabu dalam masyarakat dengan sangat kontroversi, ada yang memandang sebagai suatu hal yang biasa dan ada juga yang memandangnya sebagai suatu hal yang tabu.

⁷ M. Muhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara, Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU* (Jakarta: Dirdiktis Dirjend Pendis, 2007), 363.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM BERPOLIGAMI
YANG BERTUJUAN MEMPEROLEH ANAK LALU MENCERAIKANNYA
DALAM HASIL KEPUTUSAN *BAḤSUL AL-MASĀ'IL* NAHDLATUL
ULAMA KOTA SURABAYA DI YAYASAN TORIQUJ JANNAH PAKAL
BENOWO SURABAYA 31 JANUARI 2006 NO.13

Pernikahan merupakan *sunnahtullah* yang menjadi dambaan pada semua makhluk Allah. Menyatukan antara laki-laki dan perempuan ialah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Agar nantinya akan memberikan sebuah keturunan yang akan terus berkembang. Pada umumnya perempuan berharap ia akan menjadi istri pertama dan terakhir bagi suaminya, menjadi satu-satunya yang menyayangi dan disayangi suaminya, dengan kata lain di suatu waktu nanti suami tidak akan menikah lagi dengan wanita lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, suatu keinginan dan harapan tidak dapat terpenuhi seutuhnya, dan seiring berjalannya waktu, banyak wanita yang harus menerima kenyataan suami menikah lagi dengan perempuan lain atau berpoligami.

57

Seorang istri mungkin saja mengalami kemandulan atau mengalami penyakit parah sehingga tidak dapat memberikan keturunan ataupun melayani suami. Dalam menghadapi kemungkinan semacam ini, tentu suami memerlukan pendamping yang dapat memberikan keturunan bagi suami, yakni dengan berpoligami.

Sedangkan Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam sebuah keluarga.

Menurut penjelasan *bahsul al-masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya dalam buku “Keputusan Hukum Islam Aktual” tentang hukum berpoligami dengan tujuan untuk memperoleh anak lalu menceraikannya selama persyaratan itu tidak terdapat dalam aqad, maka tidak apa-apa, namun sepantasnya hal itu dihukumi *makruh*.

Dasar pengambilan hukum diambil dari kitab (I'anah al-Thalibin, III/278).

قَوْلُهُ وَلَا مَعَ تَأْقِيتٍ: مَعْطُوفٌ عَلَى مَعَ تَعْلِيقِ آيٍ وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ تَوْقِيئِهِ، قَالَ ع ش حَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الصُّلْبِ الْعَقْدُ أَمَّا لَوْ تَوَا فَمَقَاعِلِيهِ قَبْلُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَضُرَّ كَرْنُ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ

“Tidaklah sah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan cara menggantungkan nikah dengan suatu kejadian (ta’liq), atau dengan memberi batas waktu pernikahan (mut’ah), kawin kontrak. Syaikh Ali Syibramulisi mengatakan: “(ketidak absahan) itu terjadi apabila penentuan masanya disebutkan dalam akad nikah. Apabila (calon) suami-istri bersepakat sebelum akad nikah, untuk menikah dalam waktu tertentu, dan mereka tidak menyinggungkannya dalam akad,

maka pernikahannya tetap sah, namun sepantasnya hal itu dihukumi makruh”. (I’annah al-Thalibin, III/278).

Di dalam ketentuan hukum Islam apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi maka dalam hukum Islam, peristiwa tersebut dikenal dengan pernikahan dengan niat cerai. Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya. Sebagai contoh adalah seorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusannya sudah selesai.

Sesungguhnya masalah poligami yang ditetapkan Tuhan memberikan persyaratan sebagaimana yang disebut diatas (dua hal), sebagai jalan keluar bagi persoalan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak, sehingga kita harus melakukannya poligami tersebut takkala telah terjadi problem dan sebaliknya kita seharusnya meninggalkannya ketika tidak terjadi problem. Problem itu terkait erat dengan sejarah perkembangan dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga masyarakatlah yang menetapkan pemberlakuan poligami ataupun melarangnya, sebab dalam pemberlakuannya harus memperhatikan ada tidaknya syarat-syarat poligami itu. Akan tetapi, dalam kedua keadaan tersebut masyarakat haruslah tetap berpegang pada statistik

dan pendapat-pendapat para ahli, lalu minta pertimbangan untuk menetapkan poligami atau meninggalkannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Berpoligami yang Bertujuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya dalam Hasil Keputusan *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan, rasanya kurang tepat jikalau memperbolehkan poligami begitu saja, bahkan menjadikan Sunah hukum poligami. Salah satu alasan poligami adalah karena istri mandul atau menderita sakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat lagi sehat, ada yang sakit-sakitan, ada lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat, poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik manusia ini.

Masyarakat muslim diberbagai belahan dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasan berkenaan dengan hak laki-laki mendapat keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Berbicara mengenai poligami dengan alasan istri mandul dalam tinjauan hukum Islam, tentu tidak lepas dari pendapat para ulama.

Di kalangan para fuqaha, apabila pasangan kita mengalami mandul atau impoten, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal 1 tahun. Setelah itu suami yang menginginkan keturunan, ia boleh melakukan poligami dengan cara yang ma'ruf, baik proses maupun sikap istri untuk mendapat dukungan.

Artinya ia boleh melakukan poligami jika ia mau, dengan sikap yang bijak dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang merasa disakiti.

Dalam dua kasus di atas, seorang suami dapat berpoligami tanpa harus menceraikan istri yang pertama selagi ia memelihara kehormatannya karena darurat dapat memperbolehkan barang yang terlarang.

Dengan demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa poligami pada dasarnya melarang, kecuali dalam keadaan darurat, beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami, antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut keputusan *bahsul al-masā'il* Kota Surabaya tentang hukum berpoligami yang bertujuan untuk memperoleh anak lalu menceraikannya itu boleh, selama persyaratan itu tidak terdapat dalam aqad maka diperbolehkan, akan tetapi (ketidakabsahan) itu terjadi apabila penentuan masanya disebutkan di dalam akad nikah. Apabila (calon) suami-istri bersepakat sebelum akad nikah, untuk menikah dalam waktu tertentu, dan mereka tidak menyinggungnya di dalam akad, maka dalam pernikahan tersebut tetap sah, namun sepantasnya hal itu dihukumi *makruh*.

Sedangkan menurut Imam Nawawi dan Imam Rofi'i dalam kitab I'nah al-Tholibin menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan dengan cara menggantungkan nikah dengan suatu kejadian (ta'liq) atau syarat pada awalnya diperbolehkan, didalam kitab *tuhfah* disebutkan bahwasanya pada

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ يَلْمُوهُمْ فَعِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۚ

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Zuhri yang berdasarkan kepada janji yang diucapkan (kaul) Ali bin Abi Tholib:

قَالَ أَمَرَ نَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُنادِيَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْعَةِ وَتَحْرِيمِهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمْرٌ بِهِافَانْتَفَتِ الْمَأْمُونُونَ لِلْحَاضِرِينَ وَقَالَ أَتَحْفَظُونَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ الْمَأْمُونُونَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَادَوْا بِتَحْرِيمِ الْمُنْعَةِ

Rasulullah Saw berkata kepadaku untuk menyampaikan larangan dari nikah mut'ah dan keharamannya setelah saya diperintahkan untuk nikah mut'ah, kemudian Ma'mun berkata kepada orang yang hadir apakah kamu bisa semua bisa menjaga hadtis Zuhri ini, para hadirin menjawab iya, kemudian Ma'mun berkata astaghfirullah, sampaikan pada mereka tentang keharaman nikah mut'ah.

Dilihat dari hukum Islam tentang pernikahan yang dilakukan dengan cara menggantungkan pernikahan dengan suatu kejadian (ta'liq) atau syarat pada awalnya diperbolehkan, kemudian diharamkan selamanya sesuai dengan nash yang jelas (sharih) ketentuan syariat, dan terus menerus setelah itu diharamkan sampai hari kiamat, dan para ulama pun bersepakat bahwa pernikahan yang seperti ini itu tidak diperbolehkan.

Menurut penulis di dalam suatu pernikahan seperti yang dijelaskan di atas dikatakan merugikan pihak perempuan, karena pernikahan tersebut dilakukan dengan cara menggantungkan pernikahan dengan suatu kejadian itu diharamkan atau tidak diperbolehkan, dan mengenai keputusan *bahsul al-masā'il* Kota Surabaya apabila di dalam suatu pernikahan jauh lebih baik tidak ada perceraian, karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*, perceraian adalah perbuatan halal akan tetapi paling dibenci oleh Allah swt, meskipun tujuan dari poligami tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperoleh keturunan, agar nantinya tidak ditemukan lagi permasalahan yang seperti ini.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 65

1. PCNU Kota Surabaya dalam mengambil keputusan *bahsul al-masā'il* harus menggunakan dasar-dasar hukum Islam yang benar dan mempertimbangan kemaslahatan dalam menegakkan hukum sebagaimana semestinya.

2. Bagi orang yang ingin berpoligami seperti yang dijelaskan di atas seharusnya tidak merugikan pihak perempuan dengan menceraikannya setelah memperoleh anak karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*.

- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nawawi, Imam dan Imam Rofi'i. *I'alah al-Tholibin Juz 3*. Semarang: Toha Putra.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rahman, Abdul. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Ridwan, Muh. Saleh. *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Makasar: Alauddin University Press, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sa'dullah SM, M. *Keputusan Hukum Islam Aktual*. Surabaya: LBM PCNU Kota Surabaya, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib. Bandung: Alma'arif, 1990.
- , *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib. Bandung: FT. Al-Ma'arif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutinah, Bagong dan Suryanto. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2005.
- Sya'rawi (as), Syaikh Mutawalli. *Fiqh Perempuan Muslimah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Syafi'i (al), Muhammad Ibn Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syamsuddin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

